WADA Resmi Cabut Sanksi Indonesia

JAKARTA (KR) - WADA pada Jumat resmi mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), yang sebelumnya dinyatakan tidak patuh kepada Badan Anti-Doping Dunia tersebut.

"Menyusul persetujuan Komite Eksekutif, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) telah mencabut, dengan segera, Badan Anti-Doping Nasional (NADO) Indonesia dan Thailand dari daftar anggota yang tidak patuh terhadap WADA Code," demikian pernyataan resmi WADA, dalam laman resminya, Jumat (4/2).

WADA menyatakan kedua negara telah memenuhi kewajiban mereka, dan oleh karena itu mencabut sanksi yang dijatuhkan.

Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi kepada LADI pada 7 Oktober 2021 karena tidak patuh dalam pemberian sampel doping dengan tidak memenuhi ambang batas tes doping tahunan. Hukuman itu berlaku satu tahun.

Akibat sanksi tersebut, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dalam kejuaraan single event dan multievent internasional seperti ketika tim bulu tangkis putra tak bisa menyaksikan bendera nasional berkibar setelah berhasil meraih Piala Thomas pada 17 Oktober 2021.

Selain itu, Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Namun dengan pencabutan ini, Indonesia sudah mendapatkan kembali haknya untuk menggelar single event maupun multievent, termasuk ASEAN Para Games 2022 di Solo pada 20-31 Juli.

Sejak dijatuhkan sanksi, Indonesia berupaya melengkapi persyaratan dari WADA, termasuk melakukan tes doping yang memenuhi ambang batas tahunan serta menyelesaikan masalah administrasi LADI, sehingga Indonesia bisa terbebas dari sanksi dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan.

Saat ini masih ada dua negara yang masuk dalam daftar penerima sanksi WADA, yaitu Korea Utara dan Rusia. **(Ant)-f**

HADIR DI SUN MOTOR

Hyundai Creta Dirasakan Pelanggan DIY

YOGYA (KR) - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan Hyundai Creta lebih dekat kepada pelanggan melalui dealer resmi, Sun Motor Hyundai Mlati Yogyakarta, Kamis (3/2). Hyundai Creta menjadi produk pertama yang diproduksi di pabrik Indonesia dan menjadi kebanggaan serta manifestasi dari komitmen Hyundai untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan gaya hidup pelanggan Indonesia.

KR-Surya Adi Lesmana

Sugiharto Djojosaputro secara simbolis menyerahkan Hyundai Creta kepada konsumen.

Kehadiran Creta di Dealer Sun Motor Hyundai Mlati, Jalan Magelang Km 5,7 Mlati, Sleman ini merupakan bagian dari komitmen Hyundai untuk meningkatkan akses layanan dan produk, khususnya produk terbaru kepada pelanggan di Yogyakarta.

Makmur, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia menyampaikan, pihaknya sangat senang melalui Sun Motor Hyundai Mlati dapat mendekatkan SUV terbaru Hyundai untuk masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya.

Sementara, Sugiharto Djojosaputro, Branch Manager PT Sun Mega Motor-Hyundai Mlati menambahkan, menjadi kebanggaan bagi pihaknya untuk dapat menghadirkan Hyundai Creta di Sun Motor.

"Hyundai secara serempak menghadirkan produk terbaru Hyundai Creta, SUV terbaru, di Sun Motor Hyundai Mlati untuk dirasakan langsung pelanggan DIY dan sekitarnya," ungkap Sugi.

Dipaparkan Sugi, Sun Motor Group memiliki jaringan dealer resmi Hyundai di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta. Sun Motor adalah salah satu grup Dealer Hyundai yang terbesar di Indonesia. "Kami harap Creta dapat menjadi pilihan tepat bagi pelanggan setia Hyundai. Kami siap untuk terus berkolaborasi dan menghadirkan inovasi di masa mendatang bersama PT Hyundai Motors Indonesia," kata Sugi. **(Sal)-f**

Kasus Sambungan hal 1

Bahkan untuk memastikan Prokes yang berkaitan dengan jaga jarak bisa diterapkan dengan baik,

sekolah diperbolehkan menerapkan sistem shift dalam penerapan PTM 50 persen.

Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran dari pusat dimana DIY yang masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dapat menerapkan PTM 50 persen,"paparnya.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 273 kasus sehingga total 158.196 kasus pada Jumat (4/2). Rerata kasus positif harian mencapai 3,27 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 1.098 kasus.

" Kasus Covid-19 trennya mulai naik lagi saat ini. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yang baru tersebut 178 kasus berasal dari tracing kontak kasus positif dan 95 kasus periksa mandiri," ujarnya.

Ditya mengatakan angka kesembuhan sebanyak 10 kasus dengan demikian total kasus kesembuhan di DIY mencapai 151.821 kasus. Sementara itu, kasus pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY dilaporkan tidak terjadi penambahan kasus sehingga total kasus meninggal tetap 5.277 kasus.

" Jumlah orang yang diperiksa sampelnya di DIY sebanyak 8.340 orang. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 95,97 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3,34 persen di DIY," paparnya.

Selanjutnya, Ditya menyampaikan jumlah ketersediaan Tempat Tidur (TT) di 27 RS Rujukan Covid-19 mencapai 1.285 bed. Jumlah ketersediaan tempat tidur critical mencapai 141 bed dan terpakai 12 bed, sedangkan jumlah ketersediaan tempat tidur non critical mencapai 1.144 bed dan terpakai 125 bed.

" Keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) RS Rujukan di DIY total di kisaran 8 persen dengan rincian BOR Isolasi mencapai 11,16 persen dan BOR ICU mencapai 8,51 persen," imbuhnya. **(Ria/Ira)-f**

Wisatawan Sambungan hal 1

Tapi untuk pedagang liar tidak bisa karena mereka tidak terdaftar dalam paguyuban. Jadi secara otomaris dilarang berjualan di Malioboro karena Pemda juga tengah berkomitmen untuk menghapus pedagang ilegal di kawasan itu.Selain trotoar Malioboro, sirip-sirip jalan sepanjang 10 meter dari kawasan Malioboro juga dilarang untuk berjualan. Namun untuk sirip di Gedongtengen karena terlalu sempit maka tidak bisa 10 meter. Sebagai gantinya dibatasi dengan pagar dari Dinas Perhubungan.Jadi pemantauan di sepanjang Malioboro terus dilakukan selama proses perpindahan menuju Teras Malioboro 1 dan 2. Walaupun sebetulnya sebagian besar PKL sudah tidak ada yang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Meski begitu pihaknya tidak memungkiri masih menemukan adanya PKL liar yang menempati teras toko dengan lebar sekitar satu meter **(loc/Ria)-d**

Pemerintah Sambungan hal 1

Ia juga meminta semua pihak ikut mengawal RUU TPKS agar segera disahkan dengan pasal-pasal yang menjawab keadilan bagi korban. Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, pembahasan DIM RUU TPKS tidak terbuka.

Staf Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI Syafirah Hardani dalam keterangannya mengatakan, pada 3 Februari 2022, Jaringan Masyarakat Sipil dan Akademisi, termasuk YLBHI diundang Gugus Tugas RUU TPKS yang dikoordinatori Kepala Staf Kepresidenan untuk memberi masukan DIM RUU TPKS.

Namun demikian, KSP disebut tidak menunjukkan dokumen maupun tayangan presentasi, sehingga bisa melihat poin-poin DIM yang disampaikan.

"Para pemateri yang terdiri utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kejaksaan Agung dan Polri menyampaikan hal-hal yang ada di dalam DIM secara verbal, sehingga sulit bagi kami untuk melihat satu per satu poin DIM yang telah disusun dua hari sebelumnya," kata Syafirah.

Syafirah menyebut YLBHI memahami, pemerintah beranggapan bahwa DIM tidak dapat dipublikasikan kepada publik, namun paling tidak poin-poin yang disampaikan dapat dipaparkan secara jelas tervisualisasi atau DIM disampaikan di tempat dengan beberapa pertemuan, tidak secara verbal dan sulit dipetakan poin-poin nya.

Artinya YLBHI berharap DIM pemerintah menjangkau substansi yang direkomendasikan masyarakat sipil.

"Atas hal tersebut, kami dengan ini meminta pemerintah untuk tidak memfinalkan DIM RUU TPKS secara terburu-buru dan sebelum memberikan kepada DPR untuk membuka DIM kepada publik, agar dapat dibahas bersama melalui konsultasi publik kedua," ungkap Syafirah. **(Sim/Ant)-f**

UGM Sambungan hal 1

Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Prof Dr Paripurna SH MHum LLM memberikan presentasi terkait berbagai inovasi UGM di bidang pertahanan. Setelahnya, Menhan berdiskusi dengan pimpinan UGM serta pimpinan fakultas terkait berbagai peluang kerja sama dan pengembangan sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertahanan negara.

Isu yang dibahas di antaranya terkait pengembangan *unmanned aerial vehicle* (UAV), pemetaan, serta agro-industri untuk mendukung kedaulatan pangan.

Rektor UGM menyatakan bahwa UGM telah banyak melakukan penelitian di bidang pertahanan dan keamanan. Saat ini UGM tengah mengembangkan berbagai riset serta melakukan hilirisasi berbagai produk riset, salah satunya di bidang alat kesehatan.

Pengembangan riset-riset strategis, menurutnya, menjadi wujud upaya UGM dalam mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. "Negara kita akan maju dan disegani kalau kita menguasai teknologi. Dengan teknologi kita bisa membangun kekuatan ekonomi dan juga kekuatan militer untuk bertahan jika ada bahaya yang mengancam," ucapnya.

Kesepakatan bersama antara UGM dengan Kementerian Pertahanan memiliki ruang lingkup yang di antaranya meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan serta penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya.

Selain itu, kesepakatan juga meliputi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya, penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak. **(Dev)-d**

Perubahan Sambungan hal 1

masih banyak dijumpai warung-warung kecil maupun toko untuk menjual makanan dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu juga tempat usaha seperti persewaan komputer, warnet, foto copy dan sebagainya. Keseluruhan ruang usaha tersebut memiliki karakteristik usaha dengan ruang dan kebutuhan modal yang relatif kecil.

Seiring berjalannya waktu, karakteristik usaha tersebut berubah. Saat ini, dengan mudah dijumpai tempat usaha besar, misalnya dalam bentuk hotel, apartemen, juga toko berjejaring. Kalaupun tempat tersebut berupa tempat makan, maka tampilannya sangat *sophisticated*, yang tentunya membutuhkan modal besar untuk pengadaannya. Memang di sela-sela tempat usaha semacam itu, masih ada pula warung makan lesehan yang biasanya ramai di pagi maupun malam hari.

Fenomena ini terjadi bukan hanya di Jalan Kaliurang, namun juga dapat ditemui di ruas jalan lain, misalnya Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jalan Magelang, serta banyak ruas jalan lainnya di Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. Perubahan fungsi usaha tersebut sepertinya masih akan terus terjadi, dengan indikasi adanya penggempuran bangunan-bangunan lama dan berganti dengan lahan yang siap bangun.

Sebenarnya fenomena apakah yang tengah terjadi, dan apa dampak dari fenomena tersebut?

Ada beberapa fenomena menurut hemat penulis. Pertama, lokasi tersebut menarik sebagai pusat aktivitas bisnis, yang didukung aksesibilitas jalan yang baik beserta fasilitas pendukungnya, terutama ruang parkir baik di dalam maupun luar ruang. Lokasi tersebut juga menarik karena kedekatan dengan berbagai fasilitas publik, seperti kampus, rumah sakit, apartemen, hotel serta mall/pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki variasi pilihan aktivitas pada wilayah yang berdekatan. Sehingga efisien secara biaya maupun waktu.

Kedua, wilayah tersebut memiliki tingkat permintaan yang tinggi, berdasar karakteristik penduduk yang tinggal. Wilayah sepanjang Jalan Kaliurang misalnya, merupakan wilayah elite yang ditandai dengan perumahan-perumahan mewah dengan penghuni berdayabeli tinggi. Hal ini tentu berpengaruh juga pada style dan gaya hidup termasuk selera Sehingga mengubah pola bisnis dari level bawah menjadi menengah atas.

Ketiga, secara makro terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat pada konsumsi barang dan layanan dengan kualitas tinggi. Walaupun secara umum tingkat penghasilan pekerja di Yogyakarta termasuk terendah di Indonesia, namun tetap ada ceruk pasar masyarakat berpenghasilan tinggi.

Lalu dampak apa yang dapat muncul dengan fenomena tersebut, dan apa yang seharusnya dilakukan? Fenomena ini dapat berdampak positif maupun negatif. Kajian dari Persky and Wiewel (2000), menyatakan dampak positif dan negatif perubahan tata guna lahan dapat mencakup eksternalitas (kemacetan, biaya kecelakaan, polusi udara, berkurangnya ruang terbuka). Kemudian biaya sektor publik yang dikeluarkan pemerintah (penganggaran fasilitas umum dan subsidi). Serta dampak yang diterima pribadi (penduduk, pemilih lahan dan pelaku bisnis).

Mitigasi dampak negatif perlu disiapkan. Di antaranya antisipasi peraturan yang secara jelas mengatur ketentuan mengenai peruntukan lahan, termasuk mengenai lahan parkir dan izin usaha. Ini akan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari berubahnya tata ruang. Tarik menarik kepentingan antarberbagai pihak pasti akan muncul dengan adanya pengaturan. Namun hal tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditinggalkan.

(*Penulis adalah analis Data pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM)-d*

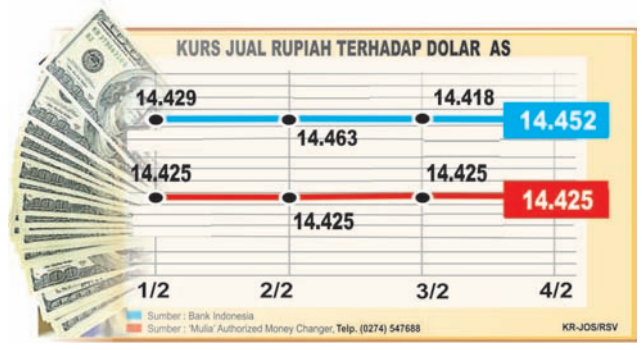

Prakiraan Cuaca Sabtu, 5 Februari 2022

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					22-30	70-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-30	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Konfrontasi Amerika Serikat-Tiongkok dalam Perspektif Geopolitik Olahraga

Aditya Maulana Hasymi, SIP, MA
Dosen Prodi Hubungan Internasional
Universitas AMIKOM Yogyakarta

TIDAK hanya di arena perdagangan, konfrontasi yang melibatkan dua seteru besar dalam politik internasional, Amerika Serikat dan Tiongkok, tergelar di gelanggang olahraga. Ajang yang seharusnya dibumbui sportifitas telah melebar dengan hadirnya kepentingan geopolitik di dalamnya.

Olimpiade Musim Dingin XXIV yang dihelat di Beijing pada 4 sampai 20 Februari 2022 ini tak lagi terlihat sebagai persoalan ajang olahraga semata. Pasalnya, konfrontasi bernada politis terpantik di luar arena yang menyudutkan tuan rumah.

Amerika Serikat dengan keras memboikot penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin di Beijing. Melalui rilis resmi dari Gedung Putih, Negeri Paman Sam ini menyatakan tidak mengirimkan pejabatnya ke upacara pembukaan Winter Olympics atas dasar masih terlibatnya Tiongkok dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang yang menjadikan komunitas Uighur menjadi korban. Apa yang dilakukan oleh AS tadi juga diikuti oleh sekutunya dimana Kanada, Australia, dan Inggris mengeluarkan kebijakan serupa.

Tak berselang lama, Pemerintah Tiongkok dengan percaya diri membalas boikot dari Amerika Serikat dan sekutunya tersebut bahwa penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin akan tetap sukses. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, yakin bahwa negaranya masih mendapat kepercayaan dari publik global untuk menggelar ajang olahraga empat tahun sekali itu. Benar saja, sahabat satu ideologi, Rusia, mendukung penuh keberadaan tuan rumah. Melalui sang pemimpin negara, Vladimir Putin, apa yang dilakukan AS dan sekutunya hanya membuat gaduh penyelengaraan Olimpiade yang seharusnya berlangsung penuh damai.

Aksi saling berbalas kebijakan antara Amerika Serikat dan Tiongkok seolah mengingatkan pada fase perpolitikan saat Perang Dingin terjadi. Sehingga apa yang terjadi saat ini ketika dua kutub besar dalam percaturan politik global saling terlibat konfrontasi bukanlah hal baru.

Medio 1980 saat Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Presiden Jimmy Carter telah melakukan kebijakan serupa boikot yang dilakukan Biden dalam gelaran Olimpiade. Kala itu, pesta olahraga sedunia diadakan oleh negara yang menjadi lawan di Perang Dingin, Rusia yang masih bernama Uni Soviet. Alih-alih mengirim atletnya, AS menolak tampil di Moskwa, sebagai wujud protes atas serbuan Soviet ke wilayah Afghanistan. Hal tersebut juga diikuti pula oleh sekutu AS di Blok Barat saat itu.

Empat tahun berselang dari 1980, giliran kota Los Angeles di Amerika Serikat berganti menjadi tuan rumah Olimpiade. Berganti negara-negara berhaluan Komunis yang dipimpin Rusia, termasuk Tiongkok di dalamnya, melakukan boikot serupa. Aksi saling berbalas boikot dalam ajang yang mencari manusia tercepat, terkuat, dan tertinggi ini menjadi bukti bahwa lingkup Perang Dingin telah masuk ke gelanggang olah raga.

Pada perspektif ilmu hubungan internasional, aksi saling berbalas boikot yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok ini terangkum dalam sebuah konsep bernama geopolitik olahraga. Pascal Gillon melalui pemikiranya berjudul 'The Olympic System: Toward a Geopolitical Approach' (2011) telah menunjukkan bahwa olahraga menjadi alat untuk berinteraksi secara politis bagi negara-negara yang ada di dunia. Masih menurut Gillon, ajang gelaran olahraga ini seolah memberikan "tempat perang baru" dengan pembagian hirarki para peserta: negara unggulan dan non unggulan. Kemudian, Natalie Koch menegaskan argumen dari Gillon tadi dalam artikel ilmiahnya berjudul 'The Geopolitics of Sport Beyond Soft Power' (2018) bahwa gelaran olahraga (dalam kasus ini Olimpiade) adalah titik temu negara dari berbagai macam latar belakang sehingga dimungkinkan ada kepentingan politik masuk.

Kini, memandang gelaran olahraga tak bisa lagi dilihat hanya sebagai ajang untuk menentukan siapa yang terbaik dalam sistem kompetisi di atas lapangan. Ajang multicabang, seperti Olimpiade, yang melibatkan banyak negara sudah barang tentu punya posisi tawarnya masing-masing dalam politik internasional. Sehingga, hal-hal yang sifatnya terjadi di luar gelanggang tak dapat ditampik lagi akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik.***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park